

# WAWASAN KEPENDIDIKAN

## Pendahuluan

Berbicara mengenai pendidikan tentu akan sangat luas dan bisa tidak terbatas.

Dalam konteks seleksi Guru (Kepala Sekolah & Pengawas) Berprestasi Tahun 2007, *wawasan kependidikan* menghendaki:

- Kemampuan memahami kebijakan pendidikan nasional
- Kemampuan memahami visi dan misi; tujuan, target dan sasaran-sasaran peningkatan mutu pendidikan
- Kemampuan memahami peran pendidikan sebagai perekat NKRI.

Sebagaimana prosedur seleksi yang berlaku (juga kita perhatikan), maka kemampuan-kemampuan tersebut akan muncul dalam suatu arena diskusi. Untuk itu *wawasan kependidikan* penting ditelusuri lebih lanjut menyangkut peran-peran sebagai guru, kepala sekolah dan pengawas itu sendiri.

## Masalah Wawasan (Konsep) Kependidikan

- a. Apakah pendidikan itu ?
- b. Apakah pendidikan Indonesia ?
  - Apakah pendidikan milik (orang) Indonesia ?
  - Apakah pendidikan sebagaimana ditetapkan perundang-undangan?
  - Apakah pendidikan yang berlangsung di bumi Indonesia ?

Pendidikan adalah **usaha sadar** dan **terencana** untuk mewujudkan **suasana belajar** dan **pembelajaran** agar **peserta didik secara aktif** mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki **kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia; serta keterampilan** yang diperlukan **dirinya, masyarakat, bangsa** dan **negara**.

- c. Adakah dan di manakah pendidikan berperan dalam pembangunan kehidupan bangsa (perekat NKRI) selama ini ?
  - Bagaimanakah pendidikan tersebut selama ini dikelola (oleh guru, kepala sekolah dan pengawas) ?

## **Tantangan Berat: Sistem Sosial Kita Terkoyak**

- a. Globalisasi (rasionalisme, liberalisme, sekulerisme, kapitalisme, dan hedonisme yang disertai permisifisme).
- b. Pendidikan sebagai paradigma pembangunan bangsa belum pernah terjelaskan.
  - Berlaku paradigma ekonomi, politik, dan keamanan.
  - Moralitas dikesampingkan.
  - *Indigenous process* tidak terjadi.
- c. Harapan dan tuntutan masyarakat makin meningkat di satu pihak, biaya pendidikan makin mahal di pihak lain.
- d. Pemerintahan multi-partai mempengaruhi gonjang-ganjing kebijakan pembangunan dan pendidikan.
- e. Liberalisasi proyek inovasi pendidikan.
- f. Revolusi informasi dan teknologi tidak selalu berpengaruh positif.

## **Masalah Strategis Pendidikan: Sekolah-Sekolah Kita Oleng!**

- a. Pendidikan saat ini tiada berjiwa (tanpa roh), semacam kehilangan filosofi sehingga salah arah.
- b. Kebijakan belum komposit dan konsisten. Uniformitas dan padat beban ketimbang diversitas dan berkesan ramping.
- c. Standarisasi pendidikan belum disertai akses politik yang memadai. Pendidikan menjadi kapitalistik bahkan sebagai *hamba* politik.
- d. Relevansi pendidikan amat terbatas. Ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah tidak cocok dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Saat ini, didengungkan *life skills* bukan *menthal skills*.

- e. Mutu pendidikan lemah, baik input, proses dan out-putnya belum dibangun dan diusahakan secara sungguh-sungguh. Inputnya minimum, prosesnya kurang menarik/ menjemukan dan hasilnya rendah.
- f. Ragu akan desentralisasi dan otonomi: peluang dan perimbangan telah dipersepsi tetapi debirokratisasi manajemen pendidikan terlalu cepat digulirkan.
- g. Partisipasi (kontrol) rakyat atas penyelenggaraan pembangunan (pendidikan) belum memadai.
- h. Anggaran belum memadai dan pengelolaannya belum efektif dan efisien.
- i. Sumber daya daerah beragam, tetapi sumber daya manusia belum mencukupi.

### **Perluasan Konsep, Usaha-Usaha dan Kebijakan**

- Perumusan visi Pendidikan Indonesia sewajarnya menopang perubahan menuju Indonesia baru laksana *mozaik* kehidupan, berkilau dinamis dan kompetitif, berwarna-warni, kultural, transaktif dan interpretif.
- Misi Pendidikan Indonesia adalah mengembangkan *sistem atau mozaik* pendidikan yang berorientasi pada kemandirian dan tuntutan pasar bebas untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara proporsional dalam dunia internasional.
- Pendidikan Indonesia itu bukanlah suatu uniformitas melainkan menyangkut masalah pilihan nilai-nilai dasar dan moral untuk setiap individu, keluarga, kelompok masyarakat (agama, budaya, etnis, kelas sosial dan kombinasinya), dan pilihan negara itu sendiri. Mungkinkan ada semacam de-konstruksi epistemologis untuk mengklarifikasi friksi-friksi tingkat ideologis ?
- Demokratisasi pendidikan bukan sekedar masalah pemerataan (wajar dikdas) tetapi masalah mutu. Masalah demokratisasi pendidikan sebenarnya merentang mulai dari perumusan kebijakan, implementasi dan manajemen, anggaran, kesejahteraan hingga masalah pembelajaran.

- Sekalipun mau dinyatakan sebagai suatu sistem (karena masalah politik), Pendidikan Indonesia tidaklah dapat dijelaskan batas-batasnya secara tegas sehingga keutuhan sistemnya bersifat hipotetik dan paradigma pengelolaannya bersifat *emergent*.
  - Berdasar asumsi dan kondisi pemikiran itu, maka melecut suatu persaingan yang amat ketat di antara *stakeholders* atau kelompok masyarakat; dan hal ini terasa mengemuka manakala legitimasi atau kebijakan di bidang pendidikan hendak dibuat.
- Mengembangkan relevansi pendidikan secara memadai dengan mengembangkan *life skills* sekaligus *menthal skills* pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
  - Membina sistem akuntabilitas (publik) untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan sekaligus membina kejujuran dan transparansi.
  - Manajemen pendidikan yang berorientasi perubahan dan mutu secara menyeluruh.
  - Mengembangkan profesionalisme untuk menyiapkan aparatur (tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya) yang kompeten dan profesional.
  - Menata kesungguhan pengelolaan pendidikan secara desentralistis dan membina otonomi tanpa harus memperdaya masyarakat.
  - Memberanikan penetapan anggaran pendidikan yang memadai dan pengelolaannya secara efisien.

---o0o---